



Problem Rendahnya Serapan APBD Jangan Jadi Tradisi

TAJUK

Akhir tahun datang lagi. Persoalan yang sama juga terulang kembali yaitu rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah daerah di DIY. Di lingkungan Pemkot Jogja misalnya problem rendahnya serapan anggaran terulang lagi. Meski tahun ini persentasenya membaik, namun bukan berarti melonjak menjadi tinggi. Tahun lalu, Oktober 2022, persentase serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Jogja baru di angka 61%. Padahal target serapan anggaran Pemkot Jogja pada 2022 di angka 86,08%. Alasan rendahnya realisasi anggaran oleh sejumlah

organisasi perangkat daerah (OPD) dikarenakan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) mundur akibat penyesuaian petunjuk teknis. Sedangkan tahun ini APBD Kota Jogja, per November 2023 baru terserap 68,47%. Penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran itu karena molornya sejumlah lelang proyek serta perubahan APBD 2023 yang baru terealisasi pada Oktober 2023. Jika tahun lalu Pemkot Jogja mendorong OPD segera mengesekusi realisasi anggaran, tahun ini strategi yang disiapkan tak jauh beda yaitu diminta merampungkan agenda tidak rutin pada November 2023. Ini untuk mengejar target

serapan anggaran yang cukup tinggi yaitu 90%. Persentase serapan APBD di Kota Jogja menjadi yang paling rendah jika dibandingkan dua kabupaten lain dalam satu kawasan aglomerasi perkotaan di DIY yaitu Kartamantul (Jogja, Sleman, Bantul). Di Bantul hingga pertengahan November 2023 penyerapan anggaran cukup tinggi yaitu sudah 87,05% dari anggaran murni. Sedangkan di Kabupaten Sleman, serapan APBD telah di angka 71%. Angka serapan ini dipastikan meningkat hingga bisa mencapai 85%-95% di akhir tahun. Serapan anggaran ini diklaim tidak ada masalah dalam realisasinya.

Serapan anggaran yang tidak sesuai target perlu lebih serius disikapi pemerintah daerah di DIY. Realisasi Pemkot Jogja adalah contoh nyata. Serapan anggaran yang rendah selalu berulang tiap tahun, bahkan strategi yang digunakan pun mirip. Tentu harus ada strategi khusus dan skenario untuk mengantisipasi praktik seperti ini. Manajemen keterlaksanaan anggaran oleh OPD harus dibenahi agar lebih efektif. Tidak hanya sekadar diimbau menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun, sehingga menjadi budaya mengesekusi anggaran di waktu singkat. Budaya semacam ini berbahaya. Kondisi ini tidak baik,

karena potensial menimbulkan sejumlah masalah seperti rawan penyalahgunaan anggaran dan potensial mengabaikan kualitas program atau pekerjaan. Anggaran idealnya terserap di sepanjang tahun dengan proporsi merata, dengan demikian perputaran ekonomi dari belanja pemerintah juga merata. Sejak awal tahun, sudah seharusnya OPD tertib dalam realisasi kegiatan sehingga keterlaksanaan anggaran bisa mencapai target. Tidak terserapnya anggaran justru akan merugikan masyarakat karena belanja daerah tidak maksimal. Padahal belanja pemerintah menjadi salah satu motor penggerak perekonomian.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005